

6

Strategi Kelangsungan Hidup Nelayan Tradisional di Pantai Arungkeke *Life Strategy Continuation of Traditional Fishermen in Arungkeke Coastal Area*

Tateki Yoga Tursilarini

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS).

Kantor: Jl Kesejahteraan Sosial No 1 Nitipuran Yogyakarta. Telpon (0274) 377265.

tursilarini@gmail.com.

Diterima 2 Januari 2014, direvisi 16 April 2014, disetujui 9 Mei 2014.

Abstract

The problem faced by fishermen community in Arungkeke Village is caused by the difficulty to develop their business, limited resource of capital, fuel increasing that is not in balance with their captive. Their selves adaptation strategy to stanch . Data resource are family heads and their members. Informants are from related institutions, village apparatus, local public figures, and social institution committed to fishermen lives. Data are gathered through interview, focused group discussion, and documentary analysis. Data are analysed through interpretative-descriptive technique. It is found that living strategy to stanch their lives are business diversification, family money management enhancement, and local value application. Those strategies survive their lives. It is recommended that fishermen need to be educated in skill and expertise on management strategy so that fisheries and rumput laut are marketable as other products. It needs always to be increased their motivation, spirit, and community support so that they always work independently from others. For local government, social, fishery and oceanery, non-government organization should have same commitment to help fishermen out from poverty, because support and policy consistency are needed to develop Arungkeke shore area, and will bring a good impact on fishermen welfare enhancement in that area.

Keywords:
Lives Continuation-Traditional Fishermen-Shore Area

Abstrak

Permasalahan yang dialami masyarakat nelayan di Desa Arungkeke antara lain disebabkan kesulitan pemilik usaha mengembangkan usahanya, keterbatasan akses sumber modal, kenaikan harga BBM tidak seimbang dengan kenaikan harga penjualan hasil tangkapan. Strategi adaptasi nelayan dalam bertahan hidup pada akhirnya mampu keluar dari keterpurukan atas upaya masyarakat sendiri, mendasari dilaksanakannya penelitian ini. Sumber data adalah kepala keluarga dan anggota keluarga nelayan, dan informan dari instansi terkait, aparat desa, tokoh masyarakat, lembaga sosial yang peduli terhadap nelayan. Data digali melalui wawancara, FGD, observasi, dan telaah dokumen. Data dianalisis secara deskriptif interpretatif. Strategi kelangsungan hidup nelayan, meliputi penganekaragaman mata pencarian, pengelolaan keuangan keluarga, penerapan nilai-nilai budaya lokal. Sejumlah strategi tersebut mampu menjawab berbagai masalah nelayan sehingga tetap survive dalam hidupnya. Direkomendasikan, nelayan perlu diberi pengembangan keterampilan dan keahlian tentang metode dan strategi manajemen, sehingga produk perikanan dan rumput laut mampu bersaing dengan produk lainnya. Perlu selalu ditumbuhkembangkan motivasi, semangat dan dukungan bagi masyarakat nelayan agar tetap berkarya dan produktif tanpa menggantungkan pada pihak lain. Bagi Pemerintah Daerah, Dinas Sosial, Dinas Kelautan dan Perikanan, LSM hendaknya memiliki komitmen yang sama untuk menjalin kerjasama dalam upaya membantu masyarakat nelayan keluar dari belenggu kemiskinan, karena dukungan dan konsistensi kebijakan sangat dibutuhkan untuk pengembangan kawasan pantai Arungkeke, akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di wilayah tersebut.

Kata kunci:
Kelangsungan Hidup-Nelayan Tradisional-Pesisir

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi perhatian dunia di bidang kelautan dan perikanan. Hal ini disebabkan oleh tiga hal, yaitu: keberanian dan ketangguhan pelaut-pelaut Indonesia sudah sejak lama dikenal di berbagai belahan dunia, bahkan di beberapa

wilayah tertentu seolah telah menjadi legenda; Indonesia memiliki potensi sumber daya dan produksi ikan yang sangat besar dan merupakan negara penghasil ikan nomor lima terbesar di dunia setelah Cina, Peru, Chili, dan Amerika Serikat. Sumberdaya pesisir kelautan adalah aset yang penting bagi negara Indonesia, ter-

luas 5,5 juta km² lautan di Indonesia dengan sumberdaya perikanan yang beragam, setiap tahunnya 6,7 juta berbagai jenis ikan, udang, dan cumi dihasilkan dari lautan Indonesia (Abdul Mugni, 2006:1). Ironisnya potensi sumber daya laut yang berlimpah tersebut belum sepenuhnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Terbukti sebagian besar masyarakat pesisir atau nelayan hidup dalam keterbatasan, baik keterbatasan ekonomi, sosial, politik, akses modal, pendidikan dan kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada nelayan, menjadikan nelayan mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya.

Belajar dari pengalaman masa lalu di era tahun 1970, pada saat dicanangkan kebijakan nasional tentang motorisasi perahu dan modernisasi peralatan tangkap yang lebih dikenal dengan istilah revolusi biru (*blue revolution*), tetapi kebijakan tersebut belum dapat menjangkau masyarakat pesisir, sehingga strategi pemberdayaan nelayan miskin perlu ditinjau kembali. Di satu sisi kebijakan motorisasi perahu dan modernisasi peralatan tangkap telah menyebabkan meningkatnya produksi perikanan, tetapi di sisi lain kebijakan revolusi biru telah pula memperparah dan meningkatkan jumlah nelayan miskin tradisional karena kalah bersaing dengan nelayan bermodal, bahkan meningkatkan kerusakan lingkungan karena eksploitasi sumber daya laut yang tidak beraturan. Pada tahun 1980-1996 kebijakan ini diperbaharui lagi dengan diluncurnya deregulasi perikanan yang mencakup pengembangan alat tangkap, pembangunan pelabuhan dan penambahan armada penangkapan ikan, baik melalui kemampuan produksi dalam negeri maupun impor kapal bekas dan pemberian izin kapal asing. Dalam perkembangan revolusi biru, pemerintah tidak hanya mengintervensi nelayan melalui modernisasi perikanan, tetapi juga meneluarkan berbagai regulasi hukum, misalnya Undang-Undang Perikanan tahun 1995 dan Keputusan Presiden No 39 Tahun 1980 yang melarang pengoperasian jaring *trawl* (pukat harimau). Pada kenyataannya kebijakan revolusi biru serta berbagai regulasi hukum yang dikeluarkan pemerintah belum sepenuhnya menunjukkan signifikansi yang nyata dalam kehidupan

masyarakat nelayan khususnya nelayan *grass-root* sebagai *common people*. Sebagian besar nelayan tradisional di Indonesia sampai saat ini masih hidup dalam situasi sosial dan ekonomi di bawah standar (taraf hidup yang subsisten dan situasi sosial yang tertinggal) dan cenderung tereksplorasi (Andri Adi Arif, 2010).

Menurut data BPS mencatat jumlah nelayan miskin di Indonesia tahun 2011 mencapai 787 juta orang atau 25,14 persen dari total penduduk nasional yang mencapai 31,02 juta orang. Sebanyak 7,87 juta nelayan berasal dari sekitar 10.600 desa miskin yang tersebar di kawasan pesisir di berbagai daerah di tanah air, termasuk salah satunya di kawasan pesisir Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan data tingkat kemiskinan masyarakat pesisir pantai tahun 2002, apabila indikator kemiskinan adalah penghasilan 1 dolar AS per hari, maka sebanyak 32 persen dari 16 juta KK nelayan atau sekitar 5.120.000 KK termasuk katagori miskin, dan apabila indikator kemiskinan adalah berpenghasilan 2 dolar AS per hari, maka jumlah nelayan miskin sekitar 60 persen dari 16 juta KK atau sekitar 9.600.000 KK.

Kondisi kehidupan masyarakat pesisir di Desa Arungekeke, Kecamatan Arungekeke, Kabupaten Jeneponto tidak jauh berbeda dengan masyarakat pesisir atau nelayan di pesisir pulau Jawa. Desa Arungekeke merupakan desa yang sebagian besar wilayahnya berada di pesisir pantai. Sebagai daerah perairan, Desa Arungekeke yang termasuk perairan laut Flores pada awalnya merupakan pesisir yang dapat dijadikan sumber mata pencaharian nelayan. Perairan Kabupaten Jeneponto merupakan pertemuan massa air dari Selat Makassar dan Laut Flores yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan 4 (WPP) Selat Makassar dan Laut Flores, merupakan salah satu WPP yang masih dapat dikembangkan karena tingkat pemanfaatannya baru mencapai 70,50 persen. Akan tetapi sejak tahun 2001-2004 terjadi penurunan kegiatan usaha perikanan *mini purse seine* yang ditandai dengan penurunan jumlah armada penangkapan. *Mini purse seine* (pukat cincin) adalah alat tangkap yang dilingkari cincin atau tali kerut yang berfungsi sebagai kantong untuk

faktor penyebab, diantaranya diduga karena kesulitan beberapa pemilik usaha perikanan *mini purse seine* untuk mengembangkan usahanya, keterbatasan akses sumber permodalan, sehingga beberapa kapal *mini purse seine* bertonase kecil dialih fungsikan menjadi kapal pengangkut kayu, dan kenaikan harga BBM pada saat itu tidak seimbang dengan kenaikan harga penjualan hasil tangkapan sehingga nelayan banyak yang merugi. Karena merugi para pemilik kapal *mini purse seine* menjual kepada pengusaha gill net ke daerah lain, selain itu juga karena kapal gill net membutuhkan BBM lebih sedikit dibanding *purse seine*.

Hasil penelitian Kusnadi (2002:1-24) tentang nelayan di pantai utara Jawa permasalahan di atas juga dialami para nelayan, bahwa pada umumnya masyarakat nelayan di desa-desa Pantai Utara Jawa, nelayan yang bisa bertahan dan meningkat kesejahteraan hidupnya adalah nelayan-nelayan bermodal besar yang kemampuan jelajahnya hingga lepas pantai, akan tetapi jumlah mereka relatif kecil. Sebaliknya untuk nelayan tradisional dengan kepemilikan modal dan kemampuan peralatan tangkap yang sangat terbatas tidak akan mampu bersaing dalam memperoleh hasil tangkapan. Sehingga secara sosial ekonomi tingkat kehidupan nelayan kecil atau tradisional tingkat kesejahteraan hidupnya rendah, dalam struktur masyarakat nelayan, kelompok nelayan tradisional dan nelayan buruh merupakan lapisan sosial yang paling miskin.

Beberapa kendala yang dihadapi nelayan tradisional di Desa Arungkeke, serta berbagai kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada nelayan tradisional, berbagai cara ditempuh agar dapat bertahan hidup (survival) dengan mengandalkan potensi dan sumberdaya kelautan pesisir pantai Arungkeke. Upaya untuk bertahan hidup, sejumlah nelayan yang memiliki sampan mencoba bertahan sebagai nelayan, dengan pekerjaan tambahan bertani rumput laut, sedangkan yang tidak memiliki perahu dan tidak dapat bekerja di kapal-kapal penangkap ikan bekerja serabutan sebagai buruh, penarik becak di Kabupaten Jeneponto atau Kota Makassar. Pada saat itu kemampuan nelayan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seolah mimpi yang tak mungkin jadi kenyataan.

Terlebih lagi apabila batasan kebutuhan dasar (*basic need*), adalah tercukupinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan termasuk perlengkapan rumah tangga dalam suatu keluarga, demikian juga tersedianya fasilitas umum, air minum, sanitasi, angkutan, kesehatan dan pendidikan (Mulyanto & Evers, 1985).

Kemampuan nelayan tradisional Desa Arungkeke secara perlahan-lahan keluar dari kemiskinan yang dialami, diakui berkaitan erat dengan jiwa dan semangat sebagai bangsa maritim yang ditandai suatu nilai budaya yang dimiliki dengan keberanian menantang alam, serta kegigihan dan ketangguhan dalam bekerja. Nilai-nilai tersebut telah diwarisi oleh para nelayan dari orangtua bahkan dari nenek moyangnya. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri nelayan tradisional Desa Arungkeke juga terikat oleh kebudayaan Bugis-Makassar yang cenderung ekspresif dan lebih terbuka. Budaya bangsa maritim yang telah melekat erat dalam jiwa nelayan, menumbuhkan semangat pantang menyerah dalam mensikapi berbagai permasalahan yang menderanya, diperlukan berbagai strategi agar tetap eksis dan bertahan ditengah-tengah goncangan yang berpengaruh dalam kehidupannya.

Deskripsi tentang nelayan tradisional dengan mengambil tindakan demi kelangsungan hidup dengan melakukan beberapa strategi survival dan pada akhirnya mampu keluar dari keterpurukan atas upaya masyarakat sendiri, telah mendasari dilaksanakannya penelitian ini. Oleh sebab itu tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah mendeskripsikan strategi ketahanan hidup nelayan tradisional dengan upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan, sosial budaya, alam oleh nelayan tradisional.

Kajian Teori

Kemiskinan sering dikaitkan dengan sifat kekurangan dan ketidakberdayaan, kemiskinan dapat digolongkan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan struktural. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diper-

lukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan, penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin (Ahmad Avenroza dkk, 2007:6).

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau disebabkan karena kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkan akan tetapi juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat. Di dalam kondisi struktur yang demikian itu kemiskinan menggejala bukan oleh sebab-sebab yang alami atau sebab-sebab yang pribadi, melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tidak adil. Tatanan yang tidak adil ini menyebabkan, banyak warga masyarakat gagal memperoleh peluang dan atau akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga mereka yang kurang beruntung dan terperangkap dalam perlakuan yang tidak adil menjadikan serba berkekurangan dan tidak sesuai dengan tuntutan hidup yang layak (Suyanto, 1995:59).

Beberapa faktor penyebab kemiskinan menurut Aulia (2009), terkait dengan tiga dimensi, yaitu: Dimensi ekonomi, kurangnya sumberdaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial orang, baik secara finansial ataupun segala jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Dimensi sosial budaya, kekurangan jaringan sosial dan struktur yang mendukung untuk mendapatkan kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat; Dimensi sosial dan politik, rendahnya derajat akses terhadap kekuatan yang mencakup tatanan sistem sosial politik.

Faktor-faktor penyebab kemiskinan menurut Arif Satria (2009: 25-26), kemiskinan masyarakat pesisir dapat dibagi menjadi tiga macam: kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan alamiah. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang disebabkan, karena struktur ekonomi, struktur sosial, dan struktur politik yang tidak kondusif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kemiskinan kul-

tural merupakan kemiskinan yang disebabkan faktor budaya, seperti kemalasan, cara berpikir fatalistik, dan rendahnya etos kewirausahaan. Sementara itu kemiskinan alamiah terjadi karena kondisi sumberdaya alam yang serba terbatas dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatan produksi. Ketiga tipe kemiskinan tersebut terkait satu sama lain. Misalnya, kemiskinan kultural dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, padahal mereka pun sebenarnya juga memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan. Keterbatasan memperoleh akses pendidikan terjadi karena ketidakmerataan pembangunan. Begitu juga mereka miskin karena tidak punya modal. Hal ini disebabkan juga karena keterbatasan mereka untuk mengakses di lembaga permodalan, baik bank maupun lembaga non bank. Keterbatasan akses tidak semata karena faktor geografis mengingat wilayah pesisir relative jauh dari perkotaan, tetapi juga karena kebijakan perbankan yang melihat kegiatan perikanan sebagai kegiatan yang penuh ketidakpastian dan resiko. Selain pertimbangan resiko dan sifat usaha yang musiman, sebagian besar pelaku ekonomi pada sektor ini juga tergolong dalam pengusaha dengan skala usaha ekonomi rendah dan tidak memiliki asset dalam jumlah berarti. Kondisi ini menyebabkan mereka tersisih dari jangkauan lembaga perbankan yang masih mendasarkan pada ketersediaan jaminan dan bukan kelayakan usaha dalam penyaluran dananya. Artinya, ketidakberdayaan masyarakat pesisir yang dipengaruhi oleh situasi yang tidak mereka kendalikan.

Secara umum nelayan tradisional diartikan sebagai nelayan yang memanfaatkan sumber daya perikanan dengan peralatan tangkap tradisional, modal usaha yang kecil, dan organisasi penangkapan yang sederhana, dan orientasi ekonomisnya terutama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari (Kusnadi, 2008:85-86). Lebih jauh tentang nelayan tradisional, Bagong Suyanto, (1996:7-15) menggambarkan, bahwa kehidupan nelayan tradisional dan buruh nelayan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi, karena sedikit goncangan atau kebutuhan mendadak, mereka akan *collapse*. Faktor penyebabnya adalah karena

dari kungkungan alam dan irama musim yang sulit ditebak, ketinggalan teknologi penangkapan ikan, kekurangan modal, tingkat pendidikan yang rendah, dan posisi tawar-menawar yang lemah. Terkait dengan kondisi kemiskinan nelayan, Arif Satria (2008) mengemukakan bahwa masyarakat nelayan di Indonesia yang sebagian besar merupakan nelayan miskin, hampir dapat dijumpai di setiap daerah pesisir pantai di Pantai Utara Jawa kondisi tingkat kesejahteraan hidupnya rendah. Kemiskinan di kampung-kampung nelayan khususnya nelayan tradisional dan buruh nelayan menjadi fenomena umum yang banyak terjadi.

Keseluruhan ciri yang melekat pada diri nelayan tradisional tersebut merupakan faktor-faktor menyebab kemiskinan nelayan tradisional yang bersifat internal. Selain itu, terdapat faktor-faktor penyebab eksternal kemiskinan nelayan tradisional, antara lain: Kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan parsial; Sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara; Kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat; Praktik penangkapan dengan bahan kimia, perusakan terumbu karang, dan konversi hutan bakau di kawasan pesisir; Penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan; Penegakan hukum yang lemah terhadap perusakan lingkungan; terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan pasca panen; Terbatasnya peluang-peluang kerja di sektor non perikanan yang tersedia di desa-desa nelayan; Kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun; Isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal, dan manusia, Kusnadi (2008:19).

Menurut Boedisantoso (1999), pada umumnya masyarakat nelayan masih hidup dalam keterbatasan, baik keterbatasan ekonomi, sosial, politik dan pendidikan. Keterbatasan ekonomi nampak pada tingkat pendapatan nelayan yang pada umumnya masih rendah, sedangkan keterbatasan sosial yang dialami oleh nelayan memang tidak terwujud dalam bentuk keterasingan, karena secara fisik masyarakat

tidak lagi dapat dikatakan terisolasi atau terasing. Keterbatasan sosial lebih terwujud dalam ketidakmampuan masyarakat nelayan dalam mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi pasar secara menguntungkan, yang ditunjukkan oleh lemahnya mereka mengembangkan organisasi ke luar lingkungan kerabat mereka atau komunitas lokal. Kenyataan inilah mengakibatkan masyarakat nelayan mengalami nasib terpinggirkan (marginal) dari proses kemajuan. Menurut Undang-Undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, "Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya". Dikaitkan dengan kondisi kehidupan nelayan tradisional, maka dapat dipastikan bahwa nelayan tradisional berada jauh dari kondisi sejahtera.

Kajian mengenai nelayan tradisional mengungkap bahwa ketidakmampuan nelayan miskin melepaskan diri dari kemiskinannya disebabkan tidak adanya modal dan tidak adanya akses ke lembaga-lembaga keuangan. Sebagian besar masyarakat nelayan tradisional tersebut berada dan hidup di desa-desa pesisir pantai yang kondisi perairannya sudah tidak memungkinkan lagi untuk memanfaatkan sumber daya perikanan karena daerah perairannya sudah dalam kondisi tangkap lebih. Masyarakat nelayan tradisional juga menghadapi berbagai tekanan sosial ekonomi yang sangat berat, kondisi ini apabila dibandingkan dengan kelompok masyarakat nelayan yang kondisi sumber daya perairannya masih potensial. Oleh karena itu agar masyarakat nelayan tradisional tetap dapat memiliki kelangsungan dalam hidupnya diperlukan berbagai strategi untuk mensikapinya. Berbagai strategi kelangsungan hidup nelayan tidak hanya bertumpu pada satu mata pencaharian saja sebagai penangkap ikan, yang mana sumber mata pencaharian tersebut belum dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, maka dibutuhkan penyediaan mata pencaharian lain sebagai alternatif yang diharapkan akan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan sosialnya. Selain itu, masyarakat nelayan melakukan penghematan serta penye

suaian dengan penghasilan yang diperoleh atau mengelola pendapatan keluarga. Strategi lainnya dengan menerapkan nilai-nilai budaya lokal berupa gotong royong antara nelayan dengan pemilik perahu.

Strategi kelangsungan hidup tersebut, secara harfiah dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBBI), strategi diartikan sebagai cara, metode dalam memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk digunakan sebaik mungkin agar tetap bertahan hidup. Memang mengharapkan nelayan untuk bekerja di luar bidang perikanan yang mungkin telah digeluti selama hidupnya tidaklah semudah membalik telapak tangan. Tidak mudah mengubah persepsi dan sikap seseorang terhadap suatu bidang pekerjaan. Akan tetapi dalam bidang apapun seseorang bekerja, dapat dipastikan bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya agar dapat hidup sejahtera atau mencapai suatu tingkat kesejahteraan sosial tertentu. Pilihan bidang pekerjaan akan didasarkan pada keyakinan bahwa pekerjaan tersebut akan memberi penghasilan sesuai dengan yang diharapkan.

Berbagai strategi diversifikasi dalam rangka pemberdayaan nelayan tradisional pada dasarnya merupakan perluasan alternatif pilihan mata pencaharian. Strategi diversifikasi ini berkaitan erat dengan perubahan sikap dan proses persuasi. Sehubungan dengan sikap dan persuasi sejumlah teori telah dikemukakan oleh para ahli psikologi. Pada awal tahun 1970-an Dr. Martin Fishbein mengemukakan teori nilai harapan (*value-expectancy theory*). Sejak pertama kali dikemukakan pada awal tahun 1970-an, *value-expectancy theory* telah mengalami perkembangan. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menguji keabsahan teori ini. Tidak mengherankan jika latar belakang teori ini adalah psikologi, karena teori ini dikemukakan oleh beberapa psikolog terkemuka, seperti Martin Fishbein, Icek Ajzen dan Philip Palmgreen. Teori ini memprediksi sikap manusia terhadap objek dan tindakan. Teori ini sangat penting untuk mengetahui *expectancy* (harapan), *values* (nilai), *beliefs* (keyakinan), *attitude* (sikap), dan *gratification sought* (pencarian kepuasan).

Berbagai strategi untuk kelangsungan hidup nelayan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan nelayan tradisional agar tetap survive. Menurut Pretty (1995), tingkat partisipasi dapat dibagi dalam tujuh tipe, yaitu: *manipulative participation, passive participation, participation by concultation, participation for material incentives, functional participation, interactive participation, dan self-mobilization*. Dalam konteks penelitian ini, strategi kelangsungan hidup nelayan merupakan upaya diri untuk mengatasi masalah diri sendiri. Upaya pengentasan kemiskinan harus diarahkan yang bersifat partisipatif, dalam arti membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk membantu dirinya sendiri keluar dari keadaan kemiskinan yang dialami. Beberapa strategi yang dilakukan masyarakat nelayan miskin merupakan partisipasi *self-mobilization* (partisipasi mandiri), masyarakat nelayan berpartisipasi dengan jalan mengambil inisiatif secara independen untuk merubah sistem, yaitu strategi diversifikasi atau penganekaragaman mata pencaharian, pengelolaan ekonomi keluarga, penerapan nilai budaya lokal masyarakat.

Penggunaan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan utama menggambarkan suatu masalah pada saat penelitian sedang dilakukan, melihat sebab-sebab dari masalah dan menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan masalah tersebut (Travers, 1978 dan Gay, dalam Consuelo G Savila, 1993: 70). Lokasi penelitian ditentukan secara *purposif* yaitu wilayah pesisir pantai yang sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan tradisional. Dasar penentuan lokasi merupakan salah satu kabupaten dari 50 kabupaten tertinggal di Indonesia. Berdasarkan kriteria tersebut ditentukan kabupaten sebagai lokasi penelitian, di Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi Selatan yang terletak di pesisir pantai selatan Pulau Sulawesi.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi: Informan, dengan kriteria orang yang mengetahui seluk beluk permasalahan kehidupan nelayan, 10 orang; Keluarga nelayan tradisional,

(isteri, anggota keluarga lain/anak yang berusia 17 tahun ke atas dan belum berumah tangga), 6 keluarga/18 orang (terdiri dari suami 6 orang, isteri 6 orang dan anak 6 orang). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan panduan wawancara, untuk data primer. *Focus Group Discussion* (FGD) digunakan dalam rangka pengayakan data primer, dilakukan dengan pihak-pihak terkait dengan permasalahan dunia nelayan. Dalam FGD dilibatkan tokoh masyarakat nelayan; wakil keluarga nelayan tradisional; pejabat setempat terkait (dari dinas sosial; kelautan dan perikanan; camat; aparat desa).

Teknik pengumpulan data melalui analisis dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang meliputi populasi nelayan tradisional, profil lokasi penelitian, potensi sumber daya yang tersedia di wilayah penelitian. Pengumpulan data juga dilakukan melalui teknik observasi, digunakan untuk melihat secara langsung aktivitas keseharian masyarakat nelayan dengan segala keunikan dan karakteristik masing-masing. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif, untuk menganalisis tentang beberapa strategi nelayan tradisional dalam upaya mempertahankan kehidupan.

Hasil Penelitian: Strategi Kelangsungan Hidup Nelayan Tradisional Arungkeke

1. Potensi Sumber Daya Pembangunan Daerah Pesisir Pantai Arungkeke

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Wilayah Kabupaten Jeneponto memanjang dari Timur ke Barat dengan panjang garis pantai ± 95 km. Perairan Kabupaten Jeneponto merupakan pertemuan massa air yang berasal dari Selat Makassar dan Laut Flores yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan 4 (WPP 4). Menurut data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto, produksi ikan yang didaratkan setiap tahunnya rata-rata 13.116,2 ton berupa ikan pelagis kecil. Kabupaten Jeneponto memiliki 35 Desa/Kelurahan yang terletak di pesisir pantai, salah satu di antaranya adalah Desa Arungkeke yang dipilih sebagai lokasi penelitian di Provinsi Sulawesi Selatan.

Desa Arungkeke merupakan salah satu desa dari tujuh desa di Kecamatan Arungkeke, sebagai desa pantai, Desa Arungkeke mempunyai garis pantai sepanjang ± 2 Km. Terdapat dua dusun dari enam dusun di Desa Arungkeke yang terletak di tepi pantai, yaitu Dusun Lassang-lassang dan Dusun Sicini. Tidak diperoleh data tentang potensi lestari perikanan di perairan Desa Arungkeke, sehingga tidak diketahui berapa besar potensi lestari perikanan Desa Arungkeke yang telah dimanfaatkan dan belum dimanfaatkan. Jenis mata pencaharian penduduk dari 300 orang penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan dan 121 orang sebagai petani tambak. Petani tambak tersebut sebagian besar budidaya ikan bandeng dan udang windu dengan mengelola tambak seluas 129 ha. Pada tahun 2009, produksi perikanan Desa Arungkeke meliputi, produksi ikan laut 1.016,7 ton, rumput laut 277,7 ton, bandeng 98,84 ton, udang windu 23,42 ton.

Sumber daya pertanian, dilihat dari luas wilayah Desa Arungkeke adalah 3,09 km², 166 ha (53,72 persen) merupakan areal pertanian berupa sawah 136 ha; tegalan 23,25 ha; dan pekarangan seluas 6,75 ha. Penduduk Desa Arungkeke yang bermata pencaharian pokok sebagai petani adalah sebanyak 731 orang. Tidak ada komoditi pertanian yang menjadi andalan, karena kontribusi Desa Arungkeke dalam produksi pertanian dan perkebunan Kecamatan Arungkeke hanya berkisar antara 2-3 persen dari seluruh produksi pertanian dan perkebunan Kecamatan Arungkeke. Produksi pertanian dan perkebunan pada tahun 2009, meliputi: padi 627,5 ton, jagung 162 ton, ubi kayu 4,5 ton, bawang merah 1,85 ton, lombok 3 ton, kelapa 40 ton, kapas 61 ton.

Sumber daya alam berupa pariwisata pantai sangat memungkinkan untuk dikembangkan karena dari tujuh desa di Kecamatan Arungkeke enam desa merupakan desa pantai. Meskipun demikian, potensi wisata pantai belum dimanfaatkan secara memadai karena terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia. Satu-satunya desa yang saat ini memiliki potensi wisata pantai yang cukup besar adalah Desa Arungkeke, seiring dengan dibangunnya 144

dan prasarana wisata pantai yang dimiliki Desa Arungkeke saat ini adalah dermaga kayu sepanjang 70 m yang dapat dijadikan tempat berlindu dari hujan dan sengatan matahari. Saat ini sedang dibangun jalan beton sepanjang 500 m menyusuri tepi pantai Dusun Sicini dengan lebar 3 m, selain itu sarana prasarana dengan telah dibangun sejumlah fasilitas MCK. Semua sarana dan prasarana yang tersedia tersebut, dan dukungan keadaan pantai yang indah dan bersih, sebenarnya memungkinkan dikembangkannya Desa Arungkeke menjadi obyek wisata pantai, terlebih lagi apabila warga masyarakat dibimbing dan dibina agar memiliki kemampuan mengelola potensi wisata tersebut.

Sumber daya sosial yang dimiliki masyarakat sehubungan dengan potensi sumber daya manusia (SDM) dan potensi kebudayaan, pada dasarnya merupakan sumber daya sosial. Untuk mendekripsi potensi (SDM), cara yang paling mudah adalah menelaah tingkat pendidikan masyarakat, fasilitas kesehatan yang dimiliki, mobilitas sosial dan kondisi keberfungsian pranata sosial, etos kerja, gender, serta tradisi budaya. Penduduk Desa Arungkeke pada umumnya hanya berpendidikan SD. Sebagian kecil saja penduduk yang lulus SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi, bahkan masih banyak penduduk yang buta aksara. Fasilitas pendidikan di desa ini terdapat sejumlah lembaga pendidikan, yaitu: fasilitas untuk sekolah anak-anak ada dua Taman Kanak-Kanak, tiga SD, satu MTs setingkat dan satu MAN setingkat SLTA.

Ketersediaan sarana dan petugas kesehatan di Desa Arungkeke juga masih tergolong kurang. Tetapi untuk ukuran sebuah desa nelayan dapat dikatakan cukup memadai. Sarana dan petugas kesehatan yang tersedia meliputi sebuah puskesmas, enam posyandu, satu klinik KB, enam pos KB, seorang dokter umum, delapan orang perawat, dua orang bidan dan tiga orang dukun bayi. Mencermati pemilikan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, dapat dikatakan bahwa potensi sumber daya sosial di Desa Arungkeke belum memadai untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sumber daya fisik merupakan salah satu penunjang yang pokok untuk melaksanakan

pengembangan wilayah. Salah satu sumber daya fisik yang merupakan faktor penting yang dapat berfungsi untuk menunjang pengembangan wilayah adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi (jalan raya) jaringan transportasi jalan raya mulai dari ibu kota Kabupaten Jeneponto (Bontosunggu) sampai ke Desa Arungkeke, seluruhnya merupakan jalan aspal. Hal ini memberi harapan bagi pengembangan wilayah Desa Arungkeke, karena dengan tersedianya jaringan transportasi jalan raya yang representatif memudahkan mobilitas manusia, barang, jasa, dan kapital.

Di samping memiliki jaringan transportasi jalan raya yang cukup memadai, terdapat sebuah pasar yang dapat menunjang kegiatan ekonomi perdagangan serta menampung aktivitas jual-beli masyarakat. Keberadaan pasar sangat penting sebagai penggerak dinamika perekonomian lokal. Pemasaran hasil-hasil produksi dari Desa Arungkeke berupa ikan, hasil pertanian, industri kecil dan kerajinan menjadi lebih mudah karena keberadaan pasar. Akan tetapi Desa Arungkeke yang merupakan desa nelayan belum memiliki Pasar Ikan, sehingga produksi perikanan dari Desa Arungkeke dijual di daerah lain di luar wilayah Kecamatan Arungkeke. Dan tentunya kondisi tersebut menyebabkan nelayan mengalami kendala untuk segera memasarkan hasil tangkapan yang diperoleh.

Sarana dan prasarana di bidang telekomunikasi yang terdapat di Desa Arungkeke dapat dikatakan cukup memadai. Di desa ini terdapat 120 sambungan telepon, 247 pesawat televisi, 226 radio, dan 673 pelan pelanggan PLN. Meskipun sarana telekomunikasi publik berupa wartel dan kantor pos belum tersedia, akan tetapi cukup banyak penduduk yang memiliki HP. Bahkan banyak nelayan yang pergi melaut berbekal Hand Phone untuk mempermudah komunikasi dengan kerabatnya di darat.

2. Aktivitas Kenelayanan Daerah Pesisir Pantai Arungkeke

Aktivitas sehari-hari nelayan di Desa Arungkeke tidak berbeda dengan kampung-kampung nelayan lainnya, di daerah tersebut sebutan nelayan dibedakan nelayan *parawé* dan *papékang*. Nelayan *papékang*

mencari ikan menggunakan pancing sebagai alat tangkap utama, sedangkan nelayan *parawé* yaitu nelayan yang dalam mencari ikan menggunakan peralatan tangkap ikan seperti, jaring bentang, *bubu* dan sejenisnya.

Pada pagi hari sudah mulai terlihat para nelayan *parawé* istilah lokal, baru pulang dari melaut dengan membawa hasil tangkapan dengan dibantu para istri ataupun anggota keluarga yang lainnya, untuk dibawa dan dijual di pasar ikan. Setelah itu mereka pulang dan beristirahat, menjelang adzan Dhuhur para nelayan mulai melakukan aktivitas mengurus tanaman rumput laut sampai sore hari.

Kepala keluarga nelayan yang masih aktif mencari ikan, mereka pergi melaut pada pagi hari (*papékang*) istilah lokal sebagai pemancing dan sebagai nelayan *parawé*. Nelayan *papékang* yaitu nelayan dalam mencari ikan menggunakan pancing sebagai alat tangkap utama. Nelayan *papékang* menggunakan waktu untuk bekerja selama 3–5 jam sehari, aktivitas mencari ikan hanya dilakukan sekitar dua jam, antara jam 06.00–08.00 pagi. Selanjutnya waktu digunakan untuk mengurus tanaman rumput laut. Nelayan *parawé* melaut pada malam hari dan menghabiskan waktu untuk bekerja rata-rata 14 jam sehari-semalam.

Menjelang azan Dzuhur tampak puluhan pria dewasa berkumpul di sekitar rumah panggung di pinggir pantai. Nelayan *parawé* tersebut merupakan nelayan yang melaut pada malam hari dan baru pulang pagi hari. Nelayan *parawé* dengan membawa peralatan tangkap ikan seperti, jaring bentang, *bubu* dan sejenisnya. Kelompok nelayan ini sepulang melaut langsung tidur, dan menjelang Dzuhur melakukan kegiatan mengurus rumput laut.

Kelompok nelayan *papékang* pada umumnya berusia antara 35–50 tahun. Mereka merupakan korban tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dari para pemilik kapal penangkap ikan. Menurunnya produksi perikanan Kabupaten Jeneponto pada tahun 2004, menyebabkan banyak pemilik kapal penangkap ikan yang mengalihfungsikan kapalnya sebagai kapal pengangkut kayu, dan sebagian lagi dijual kepada pengusaha perikanan dari daerah lain. Akibatnya banyak nelayan tradisional

atau nelayan buruh Desa Arungkeke kehilangan mata pencaharian. Sejak saat itu banyak nelayan Desa Arungkeke berkecimpung di bidang pertanian rumput laut sebagai pekerjaan sampingan.

Ketidakberdayaan nelayan tradisional atau nelayan buruh, ketika pemilik kapal menganggap usaha perikanan tidak dapat lagi memberi keuntungan yang besar, mereka mengalihfungsikan kapalnya untuk usaha lain atau menjualnya tanpa harus mempertimbangkan nasib nelayan tradisional atau nelayan buruh kehilangan mata pencaharian.

Kondisi sumber daya alam yang sangat potensial karena perairan Arungkeke merupakan wilayah yang cocok untuk dijadikan areal pertanian rumput laut, sehingga tersedia mata pencaharian baru bagi nelayan tradisional Desa Arungkeke. Selain itu, didukung dengan kesediaan beberapa pemilik perahu bermesin tempel ber PK kecil (*katinting*) yang mau membantu dan bekerjasama dalam usaha budi daya rumput laut, menjadikan nelayan tradisional tidak sendirian dalam menghadapinya.

Kerja sama antara kelompok nelayan *papékang* dengan pemilik perahu, sistem organisasi penangkapan ikan yang lama tidak dipakai lagi, tidak ada lagi pola *punggawa-sawi* (istilah lokal: *punggawa* pemilik perahu, *sawi* = awak perahu). Ikan hasil tangkapan dibagi rata antara pemilik perahu dengan nelayan setelah dipotong biaya-biaya operasional. Kemudian dalam kerjasama usaha budi daya rumput laut, pemilik perahu meminjamkan perahunya tanpa menyewa, sebagai imbalannya nelayan berkewajiban mengurus lahan rumput laut kepunyaan pemilik perahu, dari mulai memasang bibit, merawat, sampai memanen.

Kelompok nelayan *papékang* rata-rata memperoleh penghasilan dari mencari ikan berkisar antara Rp 10.000 sampai Rp 15.000 per hari. Oleh sebab itu beberapa nelayan mengistilahkan mencari ikan sebagai mencari makan, bukan mencari penghasilan, karena pendapatan dari mencari ikan benar-benar dihabiskan untuk makan setiap hari. Uang hasil penjualan ikan sekurang-kurangnya cukup untuk membeli dua liter beras, kopi, dan gula untuk konsumsi satu hari. Untuk lauk disisihkan dari ikan hasil tang

kapan sebelum dijual. Jadi, kalau nelayan tidak memiliki sumber pendapatan lain, maka ungkapannya “bekerja hari ini untuk makan hari ini”.

Nelayan *papékang* Desa Arungkeke dapat melakukan kegiatan mencari ikan sepanjang tahun, mereka tidak terpengaruh oleh peredaran bulan, karena hanya melaut di siang hari. Peralatan tangkap yang digunakan juga sangat sederhana, seperti perahu motor tempel ber PK kecil, pancing, jaring lempar (*jala*) dan jaring bentang (*panambé*) ukuran kecil. Lokasi penangkapan juga tidak jauh dari pantai, hanya sekitar tiga mil. Setiap perahu digunakan oleh 2–3 orang (pada umumnya dua orang). Target yang hendak dicapai pun sangat sederhana, yaitu untuk memenuhi kebutuhan makan hari ini. Hasil tangkapan berupa ikan pelagis kecil, seperti banyar, dan kembung, serta ikan-ikan pesisir lainnya.

Penghasilan nelayan dari usaha budi daya rumput laut sangat bervariasi, tergantung luas areal yang dikuasai. Penguasaan areal pembudidayaan rumput laut ditentukan oleh besarnya modal yang ditanamkan untuk membeli tali plastik tempat mengikatkan bibit rumput laut, serta untuk membeli bambu atau kayu untuk tiang pengikat tali tempat menggantungkan bibit-bibit rumput laut. Bagi nelayan yang areal penanaman rumput lautnya sempit dan hanya bisa menghasilkan 100 kg rumput laut setiap panen, berarti hanya akan menerima Rp 400.000,- setiap 45 hari. Jumlah tersebut lebih kecil dari penghasilan mencari ikan selama 45 hari. Akan tetapi jumlah tersebut sangat berarti bagi nelayan, karena uang sejumlah itu dapat diterima sekaligus setiap panen 45 hari sekali dan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan di luar kebutuhan makan sehari-hari, seperti: pendidikan anak, kesehatan, kegiatan sosial, ritual keagamaan. Penghasilan nelayan *parawé* dari usaha budi daya rumput laut berkisar antara Rp 300.000,- – Rp 600.000,-.

Berbeda dengan nelayan *papékang*, pada kelompok nelayan *Parawé*, organisasi penangkapan dan pola hubungan kerja *punggawa-sawi* masih tetap berlaku, dengan sistem bagi hasil 1:2, yaitu satu bagian untuk *punggawa* dan dua bagian untuk *sawi*. *Punggawa* merupakan pemilik modal, *sawi* atau peminjam, pekerja,

buruh disebut juga nelayan kecil. Pemilik modal berhak membeli hasil tangkapan *sawi* yang diberi modal. Dan *sawi* berkewajiban menjual hasil tangkapan kepada *punggawa* yang memodalinya. Kewajiban ini merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan. Modal yang diberikan oleh *punggawa* tidak terbatas pada modal materi berupa uang, tetapi juga kepada peralatan seperti kapal, mesin kapal, jaring, pancing, pukat dan sebagainya (Idham, 2010).

Peralatan tangkap yang digunakan oleh nelayan *parawé* sedikit lebih maju dibanding peralatan *papékang*, mereka pada umumnya menggunakan perahu ukuran besar (*jolloro*) bermesin 12 PK, organisasi penangkapan beranggota antara 5–6 orang. Hasil tangkapan lebih bervariasi, seperti: *selar*, *lemuru*, *katamba*, dan *udang*. Nelayan *parawé* memperoleh penghasilan lebih besar dibanding nelayan *papékang*, baik penghasilan dari menangkap ikan maupun penghasilan dari usaha budi daya rumput laut. Nelayan *parawé* rata-rata memperoleh penghasilan dari menangkap ikan berkisar antara Rp 30.000 sampai Rp 40.000,- per hari dengan hari kerja 20 hari dalam sebulan dan 14 jam dalam sehari-semalam. Kemudian penghasilan dari usaha budi daya rumput laut, nelayan *parawé*, menerima antara Rp 600.000,- sampai Rp 1.000.000,- untuk setiap panen, karena rata-rata penguasaan areal usaha rumput laut oleh nelayan *parawé*, lebih luas daripada nelayan *papékang*.

Dengan penghasilan sejumlah itu, pada umumnya nelayan *parawé*, tidak berharap diberi ketrampilan kerja/usaha di luar bidang perikanan. Yang diharapkan adalah adanya teknologi baru dalam penangkapan ikan yang memungkinkan hasil tangkapan meningkat. Pemikiran tersebut timbul dari kesadaran bahwa kenyataannya nelayan *parawé* telah menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk bekerja sehingga kecil kemungkinan untuk bekerja di bidang lain. Sebaliknya, nelayan *papékang*, yang penghasilannya lebih kecil dan masih mempunyai banyak waktu luang, sangat mengharapkan terbukanya lapangan kerja baru di daerahnya, baik bidang perikanan maupun non perikanan, agar mereka memperoleh kesempatan kerja

nelayan Arungkeke, baik nelayan *papékang* maupun nelayan *parawé* menyambut positif apabila diberi bimbingan ketrampilan kerja/usaha, baik bidang perikanan maupun non perikanan. Mereka sangat menyetujui pernyataan bahwa semakin banyak seseorang menguasai jenis ketrampilan kerja, semakin luas pula kesempatan untuk mengisi lapangan kerja yang tersedia.

3. Strategi Kelangsungan Hidup Nelayan Tradisional

Strategi kelangsungan hidup adalah segala upaya dengan menggunakan cara, metode dan pengalaman manusia untuk tetap bertahan hidup dan *survive* agar tetap eksis di dalam menjalani kehidupan. Pada dasarnya manusia memiliki daya tahan untuk tetap bertahan hidup akan tetapi semua kembali kepada manusia itu sendiri untuk bisa mengatasi segala hambatan yang dialaminya. Demikian juga yang dialami nelayan di sekitar pantai Arungkeke, bangkit untuk keluar dari keterpurukan hidup sebagai nelayan. Strategi nelayan untuk bertahan hidup merupakan wujud keberfungsian sosial pada cara yang dilakukan individu-individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupan dan memenuhi kebutuhannya. Baker, Dubois dan Miley (1992) dalam (Suharto, 2005:146) menyatakan bahwa keberfungsian sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya, serta dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Konsepsi ini mengedepankan nilai bahwa manusia adalah subyek dari segenap proses dan aktivitas kehidupannya. Bawa manusia memiliki kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses pertolongan. Pertahanan hidup bagi nelayan miskin menurut Scott (1990) dilakukan dengan berbagai upaya meliputi: Keluarga miskin mengurangi frekuensi makan dan beralih ke makan yang mutunya lebih rendah; Menggunakan alternatif sub sistem yaitu swadaya yang mencakup kegiatan-kegiatan seperti berjualan kecil-kecilan, bekerja sebagai tukang, buruh lepas; Menggunakan jaringan sosial yang berfungsi sebagai pereda kejut selama masa krisis ekonomi.

Strategi untuk bertahan hidup masyarakat nelayan di Desa Arungkeke setelah mengalami keterpurukan sejak tahun 2004, tidak menyurutkan semangat hidup masyarakat nelayan atas usaha sendiri bisa keluar dan mengatasi masalah tersebut. Beberapa strategi kelangsungan hidup yang dilakukan masyarakat pesisir di Desa Arungkeke diantaranya strategi diversifikasi atau penganekaragaman mata pencaharian, pengelolaan ekonomi keluarga, penerapan nilai-nilai budaya lokal masyarakat.

Pertama, diversifikasi mata pencaharian. Salah satu strategi bertahan hidup di tengah-tengah berbagai permasalahan yang dihadapi nelayan, karena faktor di luar kemampuan nelayan, tidak mematahkan semangat nelayan untuk bangkit menghadapinya. Penganekaragaman mata pencaharian merupakan salah satu pilihan yang dilakukan nelayan, setelah pekerjaan sebagai nelayan tidak selamanya dapat menjamin kelangsungan hidup rumah tangganya. Dengan berbagai pilihan mata pencaharian, nelayan dapat kembali memenuhi pendapatan ekonomi keluarga.

Nelayan tradisional Desa Arungkeke, yaitu sebagai nelayan *parawé* dan nelayan *papékang*. Para nelayan tersebut pada umumnya adalah pekerja yang gigih, meskipun kegigihannya dalam bekerja belum mampu membawa nelayan ke tingkat kesejahteraan sosial yang lebih baik. Kegigihan nelayan Desa Arungkeke dalam bekerja dapat dilihat dari penggunaan waktu untuk bekerja. Nelayan *parawé* melaut sekitar 16 jam dalam sehari semalam untuk mencari ikan dan merawat tanaman rumput laut. Sedangkan nelayan *papékang* walaupun hanya melaut selama lebih kurang lima jam dalam sehari, akan tetapi pada umumnya masih melibatkan diri dalam pekerjaan di darat. Data tentang pekerjaan pokok dan sampingan nelayan tradisional Desa Arungkeke menggambarkan kegigihan nelayan dalam bekerja. Kepala keluarga nelayan tradisional memiliki pekerjaan sampingan di luar pekerjaan sebagai nelayan atau pencari ikan. Mata pencaharian sampingan nelayan, ada yang menekuni sebagai petani rumput laut, petani di sawah/ladang, tukang becak, tukang kayu, buruh, dagang, dan sopir. Seperti yang diceritakan salah satu nelayan *papékang*

“...Sekarang kita bisa mi kerja yang lain, tidak cuma cari ikan, sekarang ada mi rumput laut jadi kalau pulang dari cari ikan kita priksa rumput laut. Kalau dapat ikan dan bisa dijual yang pergi jual orang perempuan, anak laki-laki yang sudah besar bantu urus rumput laut. Selama ada usaha rumput laut isteri dan anak-anakku sudah bisa bantu cari uang, jadi ekonomi rumah tangga juga tambah bagus. Dulu kalau ada undangan orang kawin, mamaknya anak-anak selalu pusing cari pinjaman uang, sekarang tidak mi lagi...karena kadang-kadang bisa mi menabung..”(Daeng H, hasil wawancara).

Nelayan *parawé* memang kecil kemungkinan untuk menambah pekerjaan sampingan selain budi daya rumput laut, karena pekerjaan mencari ikan dan budi daya rumput laut telah menyita sekitar 16 jam dalam sehari-semalam. Usaha yang dilakukan nelayan *parawé* untuk menambah penghasilan keluarga membuka warung di rumah menyediakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti yang diceritakan isteri S:

“Bapa’ kerja selaing mencari ikan, tanam rumput laut, dan buka usaha kecil-kecilan jualan kebutuhan sehari-hari ada beras, minyak, sabun, mie, garam dan lain-lain... Saya bantu bapa’.. pas panen rumput laut.. ibu-ibu kumpul tunggu bapa’-bapa’ ambil rumput laut dari laut..kita pisahkan yang masak, bagus, tidak ada penyakitnya setelah itu bantu kita jemur di pinggir pantai... Ya semua berkat izin Allah dibantu sama anak-anak, ya untuk putar ini usaha.” (Isteri S, hasil wawancara).

Berbeda dengan nelayan *papékang* yang menghabiskan waktu di laut untuk menangkap ikan dan merawat rumput sekitar lima jam dalam sehari. Nelayan *papékang* pada umumnya masih memiliki waktu luang yang dapat digunakan untuk bekerja di bidang lain. Hal ini menggambarkan bahwa nelayan tradisional di Desa Arungkeke tidak hanya sekedar bersikap positif terhadap mata pencaharian alternatif melainkan telah berpartisipasi dan berperan di dalam mengembangkan jenis mata pencaharian di luar sektor perikanan.

Salah satu strategi agar tetap bertahan hidup para nelayan melibatkan anggota kelu-

arga dalam diversifikasi atau penganekaragaman mata pencaharian. Salah satu ciri keluarga nelayan miskin yaitu, tingginya frekuensi keterlibatan anak pra usia kerja dan istri nelayan dalam usaha ekonomi rumah tangga Mukhlis, (ed), 1988:165). Ciri keluarga nelayan miskin sesuai dengan konsep mekanisme survival yang secara tegas menjelaskan bahwa, konsep mekanisme survival menurut Moser mekanisme survival dengan melibatkan segenap anggota keluarga dalam mengelola berbagai aset yang dimilikinya. Berdasarkan konsep tersebut, Moser membuat kerangka analisis yang disebut dengan *The Asset Vulnerability Framework*. Dalam kerangka tersebut terdapat beberapa cara dalam mengelola aset, meliputi: Tenaga kerja misalnya, meningkatkan keterlibatan perempuan dan anak-anak untuk membantu perekonomian keluarga; Modal manusia, misalnya memanfaatkan status kesehatan, ketrampilan dan pendidikan untuk menentukan kapasitas orang untuk bekerja dan menentukan hasilnya; Produktivitas, misalnya menggunakan rumah, tanah dan sawah untuk keperluan hidupnya; Relasi rumah tangga atau keluarga besar, kelompok etnis, migrasi tenaga kerja dan mekanisme uang kiriman; Modal sosial, misalnya memanfaatkan lembaga-lembaga sosial lokal dan memberikan kredit informal dalam proses dan sistem perekonomian keluarga.

Anggota keluarga nelayan tradisional yang berhasil di wawancara, berstatus sebagai istri, dan anak nelayan, semua anak laki-laki anggota keluarga nelayan tradisional bekerja melanjutkan pekerjaan orang tua sebagai nelayan dan pembudidaya rumput laut. Pada keluarga nelayan ada pembagian yang tegas antar anggota keluarga, pekerjaan di darat lebih banyak dilakukan oleh istri nelayan dan anak nelayan perempuan, sedangkan di laut lebih banyak dilakukan oleh nelayan (suami) dengan anak laki-laki yang telah cukup dewasa. Istri nelayan bekerja membantu suami dalam pengolahan ikan dan rumput laut. Hasil tangkapan sebagian dijual berupa ikan segar, dan ada yang diolah menjadi ikan kering, pekerjaan tersebut lebih sering dilakukan pada saat suami pulang melaut dengan membawa hasil tangkapan pada saat-

paceklik yaitu mulai bulan November, Desember merupakan masa-masa sulit nelayan karena pada musim penghujan otomatis nelayan tidak bisa dengan leluasa melaut.

Isteri nelayan juga mau bekerja apa saja demi membantu suami dalam mengupayakan kelangsungan hidup keluarga dan kesejahteraan sosial keluarga agar tidak menjadi semakin menurun. Para isteri nelayan tradisional juga mengharap diberi tambahan ketrampilan kerja agar dapat terserap di lapangan kerja lain untuk menambah penghasilan. Tidak jauh berbeda dengan kepala keluarga nelayan tradisional, anggota keluarga nelayan tradisional juga telah menunjukkan partisipasi yang tinggi dalam mata pencaharian alternatif di luar bidang perikanan. Hal ini dilakukan karena keluarga nelayan tradisional tidak bisa menggantungkan perekonomian keluarga pada salah satu anggota keluarga (ayah/suami) saja. Pada keluarga nelayan tradisional di Desa Arungkeke, pola nafkah ganda terjadi ketika anak dan isteri/anggota keluarga lain ikut bekerja menambah penghasilan keluarga dan tidak hanya menggantungkan kepada kepala keluarga. Anggota keluarga nelayan yang berstatus isteri dan anak, pada umumnya memiliki pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan. Mereka bekerja di luar bidang perikanan yaitu bertani rumput laut, berdagang, buruh bantu bikin perahu dan transportasi.

Anak Daeng H, AWL menyampaikan pengalaman hidupnya, hingga sukses menekuni usaha rumput laut menceritakan:

“Tahun 2003 saya kelas 4 SD tapi disuruh berhenti sekolah sama orang tuaku karena ndak ada biaya. Saya jadi tukang pelihara sapinya orang tapi ndak kuat..saya lari ke Makassar jadi anak jalanan. Setelah 1 tahun ndak sekolah datang bapakku ke Makassar suruh saya pulang dan sekolah lagi, katanya usaha rumput lautnya berhasil. Alhamdulillah saya bisa sekolah sampai lulus SMK. Saya sadar kalau biaya sekolahku hasil dari usaha rumput laut, mulai dari mencari bibit, menanam, merawat, dan memanen sampai mengolah supaya rumput laut punya nilai tambah, saya lakukan bersama-sama orangtua dan adik-adik tapi saya ndak larang ji bapa’ mencari ikan.” (Alw, hasil wawancara).

Anak S, nelayan *papekang* menceritakan sebagai anak tertua tidak bisa tinggal diam melihat kondisi kehidupan ekonomi keluarganya yang tidak menentu, bapaknya nelayan miskin dan untuk menghidupi keluarga orang tuanya mencari tambahan pekerjaan lain dengan usaha buka warung kecil-kecilan untuk menambah income keluarga.

“Saya bantu bapa’ sama ibu’ setelah pulang sekolah buka warung. Itu ji saya ikhlas bantu orangtua, kasihan mereka kerja keras untuk keluarga.” (AB, hasil wawancara)

Baik anggota keluarga nelayan yang berstatus isteri maupun yang berstatus anak, pada umumnya memiliki pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan. Bekerja sampingan di luar bidang perikanan yaitu pertanian, berdagang, buruh bantu bikin perahu dan transportasi. Isteri nelayan (N) ada yang bekerja jualan makanan khas Makassar, untuk menambah income keluarga, dan (Z) membantu suami merawat rumput laut,

“... Siang masak dulu bikin mi baru’ sore-sore begini mi pa’ saya jual-jualang kue-kue kaya’ jalangkote begitu, saya bawa mi ke tempat jualannya tetangga di sekitar sini. Kalo hasilnya itu biasa Rp. 30.000,- paling tinggi biasa Rp. 60.000,- biasa lalo Rp. 20.000,- ji. tidak ada untungnya pa’ ..tapi saya kasi jalan saja yang penting ada di kerja to.” (N, hasil wawancara).

“... lama sekali keluarga menderita waktu bapak ndak bekerja karena kapal ikan dijual sama yang punya. Untungnya ada orang disini yang mau kasih pinjam lepa-lepa (sampan), jadi bisa cari ikan di sekitar pantai hasilnya bagi dua, kalau dapat banyak bisa dijual untuk beli beras dan untuk lauk, kalau hasilnya sedikit makannya ubi pakai lauk ikan. Untuk tambahan usaha lain bapak pinjam uang sama *punggawa* ikan untuk modal usaha rumput laut tapi tetap ji pinjam lepa-lepa untuk cari ikan dan usaha rumput laut. 2 tahun cari ikan di pinggir pantai sambil usaha rumput laut baru mulai hidup lebih tenang. Sudah bisa bayar utang dan beli peralatan sederhana untuk bikin dodol rumput laut. Anak-anak semua bantu, saya berani mi

sudah bisa mi beli pakaian yang pantas."(Z, hasil wawancara)

Salah satu anak nelayan *parawe'*, menceritakan kegiatan yang dilakukan selama ini setelah pulang sekolah atau pada hari libur, kerja bantu-bantu buat kapal:

"...Saya masih sekolah SLTA, pas libur saya kerja atas keinginan sendiri, jadi kalo misalkan tida' iku' ka lagi di kapalnya bapa' karena tida' turung laut, yaa cari-cari ka lagi pekerjaang laing. Biasa kalo ada panggilannya temang kerja bangunang iku' ka saja, baru bapak itu biasa juga bantu-bantu orang biking kapal. Istilahnya pa' kalo' tinggal ki di darat lagi yaahh kita sendiri mi berusaha cari pekerjaan supaya ada penghasilang biarpung itu sediki' ji kasiang." (AM, hasil wawancara).

Strategi yang dilakukan masyarakat nelayan merupakan strategi alokasi sumberdaya manusia, yaitu melibatkan anggota keluarga nelayan pada diversifikasi atau penganekaragaman pekerjaan dalam rumah tangga nelayan. Strategi alokasi sumberdaya manusia tersebut merupakan bentuk dari strategi pola nafkah ganda, keterlibatan seluruh anggota keluarga di dunia kerja atau bentuk kontribusi di bidang ekonomi keluarga. Apa yang dilakukan keluarga nelayan merupakan strategi penyesuaian masyarakat pesisir atau keluarga nelayan tradisional, yaitu dengan mengerahkan isteri dan anggota keluarga untuk ikut mencari nafkah. Keterlibatan kaum perempuan/isteri dalam mencari nafkah tidak terlepas dari sistem pembagian kerja secara sexual yang banyak dijumpai pada masyarakat pesisir. Suami atau kaum laki-laki bekerja di lautan sedangkan anggota keluarga/isteri atau kaum perempuan melanjutkan pekerjaan suami di darat, misal: mengolah menjadi ikan kering, menjual ikan segar ke pasar ikan, menjemur rumput laut dan mengolah menjadi makanan atau dodol meskipun masih sangat sederhana.

Selain itu, pada umumnya kaum perempuan/isteri nelayan juga terlibat dalam kegiatan pranata sosial yang ada di masyarakatnya, seperti kelompok arisan, kegiatan pengajian, simpan pinjam, dan jaringan sosial yang ada di desa yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan

ekonomi. Keterlibatan perempuan/isteri nelayan dalam kegiatan tersebut, untuk menunjang kelangsungan hidup keluarga nelayan tradisional dalam menghadapi berbagai persoalan hidup.

Kedua, pengelolaan ekonomi keluarga. Keluarga nelayan tradisional juga mengatur sedemikian rupa pengelolaan rumah tangganya untuk bertahan hidup, diantaranya dengan menghemat pengeluaran untuk konsumsi. Pada umumnya pengelolaan keuangan yang dilakukan keluarga nelayan diserahkan sepenuhnya pada isteri, penghasilan suami maupun isteri dijadikan satu yang terpenting adalah kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan hidup untuk keluarga. Oleh karena itu pengelolaan keuangan dalam rumah tangga menjadi hal yang sangat penting, dan menurut mereka perempuan/isteri lebih mampu untuk mengatur keuangan keluarga. Suami sebagai kepala keluarga tinggal menerima laporan dari isteri tentang penggunaan uang, seperti yang diceritakan bapak IZL:

"...Semua penghasilang dari hasil laut atau hasil usaha lain kita satukan semua supaya bisa saling menutup kekurangannya. Untuk kebutuhan sehari hari ibu yang atur semuanya, biaya anak-anak sekolah sampe urusan makan ta' di ruma." (IZL, hasil wawancara).

Pemenuhan kebutuhan dasar nelayan tradisional di Desa Arungekeke, meliputi pemenuhan kebutuhan makan. Seluruh nelayan tradisional mengaku kebutuhan makan sehari-hari dapat terpenuhi, meskipun secara kualitas makanan yang disantap bersama keluarga menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Bahkan tidak jarang, hasil tangkapan ikan sebagian untuk dikonsumsi bersama-sama sebagai menu sehari-hari.

Kebutuhan sandang, nelayan cenderung kurang memperhatikan pakaian sehari-hari. Bahkan terkesan tidak menyediakan anggaran khusus untuk pembeli pakaian. Meskipun demikian, nelayan tradisional menyatakan membeli pakaian sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, yaitu menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.

Kebutuhan papan, seperti halnya perkampungan nelayan pada umumnya, letak rumah-

jauh dari bibir pantai, kondisi lingkungan tempat tinggal nelayan belum dapat dikatakan baik atau layak, bahkan ada beberapa rumah yang kurang terawat dan terkesan kumuh. Sarana jalan di sekitar pemukiman nelayan sudah cukup tertata, dengan adanya jalan pengerasan sirtu selebar ± 2 m dibatasi dengan tembok penahan ombak setinggi 75 cm dan lebar 75 cm merupakan jalan utama di Dusun Lassang-Lassang.

Pada umumnya nelayan tradisional Desa Arungkeke kebutuhan minimal akan tempat tinggal sudah terpenuhi. Terlebih lagi sejak tahun 2007 Desa Arungkeke menjadi lokasi program perbaikan kampung dengan dana APBD Kabupaten Jeneponto. Proyek tersebut berlokasi di Dusun Sicini berupa pembangunan 40 unit rumah, kemudian pada Tahun Anggaran 2008 dan Tahun Anggaran 2009 dilanjutkan dengan pembangunan 104 unit rumah nelayan. Bersamaan dengan pembangunan rumah nelayan dengan dana APBD tersebut, dibangun pula dermaga kayu sepanjang 70 m, jalan aspal sepanjang 1 km, sambungan listrik PLN sebanyak 144 sambungan, dan sarana MCK dengan anggaran dari Bank Dunia.

Pemenuhan kebutuhan sosial, kondisi terpenuhinya kebutuhan sosial nelayan Desa Arungkeke, diukur dengan menggunakan indikator kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan hubungan sosial. Kebutuhan pendidikan, nelayan Desa Arungkeke sebagian besar berpendidikan SD, sebagian lainnya lulus SLTP dan sebagian terkecil lulus SLTA, hal itu menunjukkan bahwa taraf pendidikan nelayan Desa Arungkeke relatif rendah. Dalam penelitian ini, kemampuan nelayan Desa Arungkeke memenuhi kebutuhan keluarga akan pendidikan, diukur dengan menelaah pendidikan anak-anak. Tidak ada nelayan Desa Arungkeke yang tidak mampu menyekolahkan anak. Hal ini ditandai dengan tidak adanya anak-anak usia sekolah dari keluarga nelayan Desa Arungkeke yang tidak bersekolah, meskipun hanya sampai jenjang pendidikan setingkat SLTP.

Kebutuhan pemeliharaan kesehatan, banyak nelayan tradisional bila sakit atau merasa tidak enak badan, biasanya membeli obat di warung-warung. Keluarga nelayan pada umumnya tidak menyediakan anggaran khusus untuk

pemeliharaan kesehatan. Sarana kesehatan yang terdapat di Desa Arungkeke, berupa Puskesmas, sembilan Posyandu dengan seorang dokter umum dan delapan orang paramedis, serta dua orang bidan. Kebutuhan pelayanan kesehatan nelayan dan keluarganya secara minimal sesungguhnya sudah terpenuhi, karena pada umumnya nelayan tradisional Desa Arungkeke merupakan pemegang kartu jaminan kesehatan masyarakat.

Ketiga, penerapan nilai-nilai budaya lokal masyarakat. Krisis yang melanda nelayan tradisional Arungkeke akibat fluktuasi produksi ikan tangkap telah menyebabkan memudarnya fungsi gotong royong dalam masyarakat Arungkeke. Setiap orang secara sendiri-sendiri berusaha untuk bertahan hidup. Pemilik kapal penangkap ikan menjual kapalnya untuk mencegah kerugian yang lebih besar, tanpa memperhitungkan para buruh nelayan yang akan kehilangan pekerjaannya. Nelayan tradisional menggunakan alat tangkapnya secara optimal untuk memperoleh hasil tangkapan yang lebih banyak.

Situasi masyarakat nelayan di pesisir pantai di Desa Arungkeke, khususnya di lingkungan nelayan tradisional saat itu sesuai dengan pendapat Mattulada (1988) yang mengemukakan, bahwa kebudayaan tradisional memiliki ciri umum, yaitu keterpaduan segenap komponen yang membangunnya. Apabila suatu komponen kehilangan fungsinya, maka akan terjadi ketidak seimbangan dalam totalitas kebudayaan. Perlu beberapa saat lamanya kegoncangan-kegoncangan untuk menemukan keseimbangan baru Mattulada (1988). Nelayan tradisional tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk menemukan keseimbangan baru. Selang beberapa waktu di dalam masyarakat nelayan, muncul bentuk gotong royong yang berbeda dengan pola hubungan gotong royong yang telah lama dikenal. Pranata sosial bentuk baru ini bahkan belum memiliki sebutan yang baku, sebagian orang menyebut "situlung-tulung". Pranata sosial ini merupakan sebuah corak hubungan yang terjadi antara para pemilik perahu dengan para buruh nelayan di sekitarnya yang secara sosial ekonomi biasanya berstatus lebih rendah. Hubungan yang terjadi antara pemilik perahu

sukarela dan saling menguntungkan, artinya merupakan sebuah relasi simbiosis mutualiasme atau hubungan yang saling membutuhkan dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Pranata *situlung-tulung* dalam masyarakat Desa Arungkeke ini tergolong baru yang muncul dan mulai diterapkan pada tahun 2007 setelah terjadinya krisis di kalangan nelayan tradisional. Pranata *situlung-tulung* ini telah memudarkan nilai ekonomi peralatan tangkap, seperti perahu dan alat tangkap ikan lainnya. Peralatan yang pada awalnya dapat dijadikan sumber penghasilan pemilik peralatan, telah bergeser fungsinya menjadi peralatan yang lebih berfungsi sosial. Misalnya perahu milik Pak Ali boleh digunakan oleh nelayan Budi untuk mencari ikan tanpa dibebani kewajiban apapun. Namun biasanya nelayan yang meminjam perahu akan membagi sama rata hasil tangkapannya dengan pemilik perahu setelah terlebih dahulu menyisihkan ikan hasil tangkapan senilai biaya yang telah dikeluarkan. Dalam hal perahu digunakan untuk menanam, merawat dan memanen rumput laut, maka peminjam merasa berkewajiban untuk membantu pemilik perahu untuk menanam, merawat dan memanen rumput laut milik pemilik perahu. Pola hubungan kerja sama tersebut dalam bahasa Makassar disebut *situlung-tulung* yang berarti saling tolong-menolong. Itulah bentuk pranata sosial yang tumbuh di kalangan nelayan tradisional setelah terjadinya krisis produksi ikan tangkapan di Desa Arungkeke pada tahun 2000.

Didasari nilai *situlung-tulung* penggunaan peralatan tangkap pinjaman (tidak menyewa) mengarahkan nelayan untuk tidak mencari hasil tangkapan sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara, melainkan hanya mencari ikan semampunya dan sedapatnya saja. Dengan demikian secara langsung nelayan telah menjaga kelestarian ikan, ekosistem, dan lingkungan biofisik. Selain itu, penggunaan peralatan tangkap pinjaman yang didasari nilai *situlung-tulung* dapat menjaga hubungan antara nelayan, pemilik peralatan dan lingkungan sosial/budaya. Pranata *situlung-tulung* mendorong nelayan untuk melakukan penangkapan ikan secara terencana dan menyesuaikan dengan

berbagai kebijakan pengelolaan perikanan, karena nelayan tidak perlu khawatir menderita kerugian atau tidak mampu membayar sewa peralatan.

Kerjasama pengelolaan sumberdaya kelayatan yang didasari pranata dan nilai *situlung-tulung* telah mencerminkan pelaksanaan tiga komponen kunci dalam pembangunan perikanan berkelanjutan yang dikemukakan Charles (2001), yaitu: sistem alam (meliputi: ikan, ekosistem dan lingkungan biofisik), sistem manusia (meliputi: nelayan, komunitas perikanan, lingkungan ekonomi, sosial/budaya), dan sistem pengelolaan perikanan (mencakup: perencanaan dan kebijakan perikanan serta pembangunan perikanan).

Analisis Teoritis atas Temuan Penelitian

Serangkaian kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir atau nelayan masih menimbulkan berbagai persoalan di dalam penerapannya. Salah satu kebijakan pemerintah dengan istilah revolusi biru tentang motorisasi perahu dan modernisasi alat tangkap, diharapkan akan meningkatkan hasil tangkapan nelayan sehingga pendapatan nelayan meningkat. Dalam kenyataannya kebijakan tersebut hanya dapat dinikmati dan dirasakan oleh sebagian kecil nelayan yaitu kelompok nelayan yang memiliki modal besar, alat-alat tangkap modern, dan kemampuan kapal jelajah yang dimiliki dapat mencapai hingga ke lepas pantai (*off shore*).

Selain kebijakan yang belum dirasakan manfaatnya, masyarakat pesisir pantai Arungkeke mengalami berbagai kendala, diantaranya diduga karena kesulitan beberapa pemilik usaha perikanan *mini purse seine* untuk mengembangkan usahanya, keterbatasan akses sumber permodalan, sehingga beberapa kapal *mini purse seine* bertonase kecil dialih fungsikan menjadi kapal pengangkut kayu, dan kenaikan harga BBM pada saat itu tidak seimbang dengan kenaikan harga penjualan hasil tangkapan sehingga nelayan banyak yang merugi. Karena merugi para pemilik kapal *mini purse seine* menjual kepada pengusaha gill net ke daerah lain, selain itu juga karena kapal gill net membutuhkan BBM lebih sedikit dibanding *purse seine*.

faktor penyebab lainnya, kondisi alam dan irama musiam yang sulit ditebak, tingkat pendidikan yang rendah sehingga nelayan tetap hidup dalam ketidakberdayaan dan keterbatasan baik ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan.

Beberapa keterbatasan dan ketidakberdayaan, tidak serta merta menjadikan nelayan tidak memiliki kemauan untuk mengubah nasib agar lebih baik. Strategi adaptasi nelayan dalam mensikapi berbagai kendala tersebut dengan melakukan berbagai strategi untuk kelangsungan hidup untuk keluarganya. Strategi kelangsungan hidup adalah segala upaya dengan menggunakan cara, metode dan pengalaman manusia untuk tetap bertahan hidup dan *survive* agar tetap eksis menjalani kehidupannya. Pada dasarnya manusia memiliki daya tahan untuk tetap bertahan hidup akan tetapi semua kembali kepada manusia itu sendiri untuk bisa mengatasi segala hambatan yang dialaminya. Demikian juga yang dialami nelayan di sekitar pantai Arungkeke, bangkit untuk keluar dari keterpurukan hidup sebagai nelayan. Strategi kelangsungan hidup yang dilakukan masyarakat pesisir di Desa Arungkeke diantaranya strategi diversifikasi atau penganekaragaman mata pencaharian, pengelolaan ekonomi keluarga, penerapan nilai-nilai budaya lokal masyarakat.

Pemberdayaan nelayan miskin memberikan penekanan pada partisipasi seluruh masyarakat dalam kegiatan pengentasan kemiskinan, termasuk di dalamnya partisipasi dari masyarakat miskin itu sendiri mengacu pada teori nilai harapan (*value-expectancy theory*), Martin Fishbein (1970), bahwa partisipasi muncul apabila ada harapan yang lebih baik dari apa yang dilaksanakan. Strategi survival yang dilakukan masyarakat nelayan di pesisir pantai Arungkeke berupa penganekaragaman mata pencaharian merupakan wujud tingginya partisipasi nelayan tradisional dalam pengembangan mata pencaharian alternatif atau pekerjaan sampingan bidang perikanan maupun di luar perikanan yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Tingkat partisipasi masyarakat menurut Pretty (1995), partisipasi dapat dibagi dalam tujuh tipe, yaitu: *manipulative participation, passive participation, participation by concultation, participation for material incentives, functional*

participation, interactive participation, dan self-mobilization. Pengentasan kemiskinan harus bersifat partisipatif, dalam arti membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk membantu dirinya sendiri keluar dari keadaan kemiskinan yang dialami. Beberapa strategi yang dilakukan masyarakat nelayan miskin merupakan partisipasi *self-mobilization* (partisipasi mandiri), masyarakat nelayan berpartisipasi dengan jalan mengambil inisiatif secara independen untuk merubah sistem, yaitu strategi diversifikasi atau penganekaragaman mata pencaharian, pengelolaan ekonomi keluarga, penerapan nilai-nilai budaya lokal masyarakat.

Upaya pengembangan mata pencaharian alternatif baik di bidang perikanan maupun luar perikanan yang dilakukan secara intensif berupa budi daya rumput laut dalam kenyataannya menunjukkan bahwa usaha budi daya rumput laut cukup menjanjikan untuk peningkatan kesejahteraan, dan mendorong sebagian nelayan untuk ikut melakukan usaha budi daya rumput laut. Nelayan *parawe'* dan nelayan *pape'kang* telah menjadikan usaha budi daya rumput laut sebagai pekerjaan sampingan, dan terbukti mereka telah mampu memenuhi kebutuhan dasar yaitu tercukupinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan termasuk perlengkapan rumah tangga dalam suatu keluarga, demikian juga tersedianya fasilitas umum, air minum, sanitasi, angkutan, kesehatan dan pendidikan.

Penutup

Berbagai keterbatasan dan ketidakberdayaan tidak menyurutkan semangat nelayan untuk bangkit mengubah nasib agar lebih baik. Masyarakat nelayan di Desa Arungkeke yang terikat oleh kebudayaan Bugis-Makassar yang cenderung ekspresif dan lebih terbuka serta memiliki keberanian menantang alam, kegigihan, dan ketangguhan dalam bekerja merupakan nilai-nilai yang diwariskan dari orangtua bahkan dari nenek moyangnya. Terbukti ketika pada tahun 2004 para nelayan mengalami penurunan produksi sumber daya ikan, para nelayan bangkit untuk memilih alternatif pekerjaan lain di luar bidang perikanan yaitu mulai dikembangkan

pencaharian alternatif merupakan salah satu strategi nelayan tradisional dalam mempertahankan kehidupannya. Yaitu dilakukan dengan berinisiatif atas upaya diri sendiri dengan menciptakan alternatif panganekaragaman mata pencaharian di luar perikanan, dengan mengembangkan dan melakukan pekerjaan mengelola budi daya rumput laut, membuka usaha kecil-kecilan, buruh membuat kapal, dan pekerjaan sampingan lainnya yang dapat dilakukan pada saat tidak melaut.

Beberapa strategi yang lain yaitu, secara bersama-sama atau bergotong royong melakukan upaya menciptakan alternatif pekerjaan sampingan, bekerja sama dengan para pemilik perahu untuk melakukan budi daya rumput laut yang masih sangat potensial untuk dikembangkan di Desa Arungkeke. Penerapan nilai-nilai gotong royong berupa pranata *situlung-tulung* di kalangan nelayan tradisional telah mendorong tumbuhnya kembali semangat nelayan tradisional untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan Desa Arungkeke secara optimal. Meningkatnya kemauan dan kemampuan nelayan tradisional dalam memanfaatkan potensi sumberdaya kelautan Desa Arungkeke, mendorong meningkatnya kesejahteraan nelayan tradisional Desa Arungkeke. Strategi adaptasi nelayan dalam mensikapi berbagai permasalahan yang dihadapi, keluarga nelayan melakukan pengelolaan keuangan dalam rumah tangganya, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi disesuaikan dengan kondisi keuangan yang diperoleh.

Dari kesimpulan di atas diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut, diperlukan pengembangan ketrampilan dan keahlian di bidang budidaya perikanan dan budidaya rumput laut yang meliputi metode dan strategi manajemen budidaya tersebut sehingga produk perikanan dan rumput laut mampu bersaing dengan produk lainnya di daerah tersebut. Perlu selalu ditumbuhkembangkan motivasi, semangat dan dukungan bagi masyarakat nelayan agar mereka tetap berkarya dan produktif baik di bidang perikanan maupun di luar perikanan tanpa menggantungkan pada pihak lain, dan dapat mencari alternatif pemecahan sendiri. Bagi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Jeneponto,

dukungan dan konsistensi kebijakan sangat dibutuhkan untuk pengembangan kawasan pesisir pantai yaitu Desa Sicini dan Desa Las-sang-Lassang agar potensi sumber daya baik perikanan, rumput laut dan sumber daya lainnya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Kebijakan pengembangan kawasan pesisir pantai di wilayah tersebut, yaitu dengan telah tersedianya sarana jalan, perumahan nelayan, fasilitas dermaga kayu, fasilitas umum untuk pengembangan usaha kecil dapat menciptakan dan memperluas kesempatan kerja, sehingga akan menarik minat investor untuk mendorong pembangunan di kawasan pesisir pantai menjadi kawasan yang bernilai ekonomis. Dan tentunya akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di wilayah tersebut.

Bagi instansi terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kelautan dan Perikanan serta lembaga sosial yang menaruh perhatian pada masyarakat nelayan hendaknya memiliki komitmen yang sama untuk menjalin kerjasama antar instansi, lembaga sosial dalam upaya membantu masyarakat nelayan keluar belenggu kemiskinan. Diharapkan instansi dan lembaga sosial di dalam membuat kebijakan harus memperhatikan karakteristik masyarakat nelayan yang sangat berbeda dengan masyarakat lainnya. Program pemberdayaan bagi masyarakat nelayan seharusnya bisa menjadi suatu kegiatan pengembangan berdasarkan kebutuhan yang dirasakan oleh nelayan. Peran pemerintah atau instansi terkait dan pihak lain, adalah melakukan pendampingan agar alternatif pemecahan tersebut bisa dilaksanakan disamping memberikan alternatif pilihan lainnya yang selama ini belum dilakukan oleh masyarakat nelayan.

Pustaka Acuan

Abdul Mugni, (2006). *Strategi Rumah Tangga Nelayan dalam Mengatasi Kemiskinan*, (Studi Kasus Desa Linting, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Bogor: Fakultas Pertanian IPB.

Andi Adri Arief, *Modernisasi Perikanan: Apa Yang Terjadi?*

- doc/14684717/Modernisasi-Perikanan, di akses tanggal 16/10/2010).
- Arif Satria, (2008). *Negeri Bahari yang Melupakan Nelayan*, Senin 9 Juni 2008, PRI/ Kompas Images.
- Aulia, Tessa. F. (2009). *Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan dan Kemiskinan Aspek Sosial Budaya*. Jakarta: Draft Laporan Final Hibah Multidisiplin UI.
- Arif Satria, (2009), *Pesisir dan Laut untuk Rakyat*. Bogor: IPB Press.
- Ahmad Avenroza, dkk, (2007). *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2007*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Boedisantosa, S, (1999). Komuniti Lokal di Kawasan Pesisir dan Pemberdayaannya, *Makalah Lokakarya Pembangunan Pranata Sosial Komunitas Pesisir*, Depok, 30 Mei-1 Juni 1999.
- Baker, Dubois dan Miley.1992 dalam Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refina Aditama.
- Charles, A.T. (2001), *Sustainable Fishery System*, Blackwell Science, Ltd.
- Consuelo G. Sevilla, dkk, (1993), *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press.
- Fishbein, M & Azjen, I, (1975). *Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research*, Massachusetts: Addison-Wiley Publishing Company.
- Idham, (2010). Struktur Ekonomi Masyarakat <http://sistem-pembagian-hasil-punggawa-sawi.html>.
- Kecamatan Arungkeke Dalam Angka Tahun (2010)*. Koordinator Statistik Kecamatan Arungkeke dan BPS Kabupaten Jeneponto.
- Kusnadi, (2008), *Akar Kemiskinan Nelayan*, Yogyakarta: LKIS.
- Kusnadi, (2002). *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*, Yogyakarta: LKIS.
- Mattulada,(1988), Kebudayaan Tradisional, Sekelumit Tentang Sulawesi Selatan, dalam Harsya.W.Bachtiar dkk *Masyarakat Dan Kebudayaan*, Kumpulan Karangan Untuk Selo Soemardjan, Jakarta: Djambatan.
- Mulyanto, dan Hans Dietr Evers. (1985). *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, Jakarta: Rajawali.
- Mukhlis, (ed), 1988:165-228), dalam Daulay Perdamean, Mamik Sumarmi. Tanpa tahun terbit. *Survival Mechanism Victim Household of Lumpur Lapindo in Sidoarjo-Jatim*, Surabaya:UPB JJ UT. PDF.
- Moser, dalam Daulay Perdamean, Mamik Sumarmi. Tanpa tahun terbit. *Survival Mechanism Victim Household of Lumpur Lapindo in Sidoarjo-Jatim*, Surabaya:UPB JJ UT. PDF
- Pretty, Jule, N. (1995). *Participatory Learning for Sustainable Agriculture*. London: Sustainable Agriculture Programme, International Institute for Environment and Development, 3 Endsleigh Street.
- Radi R dan Riant Nugroho, (2007). *Managemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Elex Medio Komputindo.
- Suyanto, Bagong, (1995), *Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refina Aditama.
- Scott, James.C. (1990). *Perlawan Kaum Tani*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Undang Undang No 11 Tahun 2009